

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara periodik menjadi salah satu tolak ukur bahwa negara ini adalah negara yang demokratis. Pelaksanaan pemilu ini juga menjadi bukti bahwa negara telah memberi kebebasan pada rakyat dalam menentukan pemimpin sesuai dengan pilihannya. Secara tidak langsung, keberadaan pemilu di negara yang mengedepankan nilai demokrasi sudah pasti menuntut adanya partisipasi politik yang aktif dari masyarakat. Berbicara mengenai pemilu, perilaku tidak memilih atau golput telah menjadi musuh besar bagi demokrasi itu sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri kemunculan golput itu sendiri sulit untuk dihindari. Fenomena menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di Indonesia sepatutnya mendapatkan perhatian khusus.¹ Sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan tindak pengawasan terhadap pemimpin dan pelaksana pemerintahan.

Almond, Verba, & Sidney mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah jantung dari sebuah sistem demokrasi.² Partisipasi politik yang rendah atau tidak adanya sama sekali merupakan bentuk masalah dalam praktek demokrasi. Pemilu atau pemilihan umum yang dilaksanakan dengan partisipasi yang tinggi oleh masyarakat akan menunjukkan kualitas demokrasi yang lebih baik, yang akan memberikan legitimasi terhadap pasangan calon yang terpilih. Secara konvensional partisipasi politik dimaknai sebagai keikutsertaan warga negara

¹ Suriyanto, Panji. 2018. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Karo Tahun 2015. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. Hlm. 5

² Olsson, Sofia Arkhede. 2014. Corruption and Political Participation: A Multilevel Analysis. QoG Working Paper Series 12. University of Gothenburg. Hlm. 1

dalam aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi struktur pemerintah, pemilihan wakil, dan kebijakan. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik.³ Sedangkan partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁴

Sampai saat sekarang ini, hal yang paling penting untuk melihat sejauh mana masyarakat untuk ikut campur dalam aktivitas urusan politik adalah, kehadiran masyarakat dalam pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Partisipasi politik jika dilihat dari bentuknya terdiri dari berbagai macam kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Seperti diskusi politik, kegiatan kampanye, pemberian suara dan lain sebagainya. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi menjadi: kegiatan pemilihan, kegiatan organisasi, *lobby*, *contacting*, dan tindakan kekerasan/*violence*.⁵

Negara-negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat dianggap akan lebih baik. Tingginya partisipasi politik menandakan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin terlibat di dalam kegiatan politik tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.⁶

³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010, Hal: 185

⁴ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, 1998, Hlm : 2

⁵ Huntington, S.P & Joan M. Nelson. 1984. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 6-7

⁶ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. *Op. Cit.* hlm. 369

Menurunnya tingkat partisipasi memilih masyarakat dalam pemilihan di pengaruhi oleh berbagai macam faktor.⁷ Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik terbagi menjadi: faktor sosial ekonomi (ukuran populasi, stabilitas populasi, perkembangan ekonomi), faktor politik (kedekatan menuju tempat pemilihan, persepsi terhadap isu politik yang sedang berkembang, pelaksanaan kampanye, perpecahan dalam politik), faktor kelembagaan (sistem pemilu, pemungutan suara wajib, pemilu terkini/terbaru, persyaratan pendaftaran, susunan pemilu), dan juga faktor individual (umur, pendidikan, kepentingan politik, tanggung jawab kewarganegaraan).

Persepsi korupsi dan partisipasi politik merupakan isu yang kompleks dan telah menjadi fokus banyak penelitian. Secara umum, persepsi korupsi merujuk pada anggapan masyarakat tentang seberapa luas praktik korupsi terjadi di suatu negara atau lembaga. Sementara itu, partisipasi politik mengacu pada berbagai cara masyarakat terlibat dalam proses politik, mulai dari pemilu, demonstrasi, hingga keikutsertaan dalam organisasi politik. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di kota Padang pada rentang tahun 2015 hingga tahun 2020 inilah yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang.

Ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di kota Padang seperti kasus suap RAPBD 2016⁸, kasus dana hibah KONI Kota Padang, kasus korupsi pengadaan meubelair kantor walikota Padang, kasus korupsi pengadaan alat berat dinas PUPR Kota Padang, kasus korupsi dana BOS madrasah swasta Kota Padang, kasus korupsi pembangunan embung Lubuk Minturun, dan terakhir adanya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dinas perkimtan kota padang⁹. Kasus korupsi yang

⁷ Solijonov, Abdurashid. 2016. Voter Turnout Trends around The World. *Stockholm: International IDEA*. Hlm. 35-40

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230508210454-12-946934/kpk-tahan-5-anggota-dprd-jambi-terkait-suap-ketok-palu-apbd>. diakses pada 10 Juli 2024

⁹ <https://www.kompas.com/tag/korupsi-disdik-sumbar>. diakses pada 10 Juli 2024

merajalela inilah yang membuat masyarakat enggan untuk ikut serta dalam memilih pada pilkada Sumatera Barat tahun 2020.

Selain persepsi korupsi yang mempengaruhi partisipasi politik, faktor lain seperti kepuasan hidup masyarakat juga menjadi faktor yang juga ikut dalam mempengaruhi partisipasi politik. Secara umum, kepuasan hidup merujuk pada tingkat sejauh mana seseorang merasa puas dengan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Pada beberapa penelitian mengungkapkan bahwa individu yang puas dengan kehidupannya memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam kegiatan politik atau aktivitas politik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara kepuasan hidup dan partisipasi politik.

Penelitian dan upaya-upaya dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat telah banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan di berbagai negara antara lain dilakukan oleh, W. Zheng tentang pengaruh persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di China.¹⁰ Flavin & Keane tentang pengaruh kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di Amerika Serikat.¹¹ Inman & Andrews tentang pengaruh persepsi korupsi terhadap partisipasi politik pada beberapa negara demokrasi baru di Afrika.¹²

Hasil dari berbagai penelitian terdahulu diatas telah mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan antara persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik dalam pemilu. Penelitian ini akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini dikarenakan peneliti

¹⁰ Zheng, Wen-wen, et. al. 2016. Life Satisfaction as Buffer of the Relationship Between Corruption and Political Participation. *Social Indicator Research*

¹¹ Flavin, Patrick & Keane, Michael J. 2012. Life Satisfaction and Political Participation: Evidence from the United States. *Jurnal Happiness Studies*

¹² Inman, Kris & Andrews, Josephine T. 2009. Corruption and Political Participation in Africa: Evidence from Survei and Experimental Research. Chicago, I.L: *Paper presented at the 2008 meetings of the Midwest Political Science Association*

belum menemukan kajian tentang hubungan antara persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di dalam Pilkada.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2020 merupakan keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Menjelang Pemilu 2020 beberapa peraturan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang kandidat tertentu untuk mencalonkan diri, seperti pezina dan politikus yang merupakan mantan narapidana korupsi.

Kota Padang menjadi salah satu daerah yang juga ikut melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Padang pada pilkada Sumatera Barat tahun 2020 yakni sebanyak 52,12 persen, angka ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan target KPU yakni sebanyak 77,5 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu angka ini naik beberapa persen yakni sebesar 52,06 persen. Berikut perbandingan partisipasi pemilih di Kota Padang pada pilkada serentak dari tahun 2005 ke tahun 2020.

Tabel 1.1

Partisipasi Politik Kota Padang pada Pilkada serentak 2005-2020

Tahun	Jumlah Pemilih	Persentase
2005	286,834	53,30%
2010	300,461	54,25%
2015	290,189	52,06%
2020	321,093	52,12%

Sumber: Diolah dari KPU Sumatera Barat

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan perbandingan partisipasi pemilih masyarakat Kota Padang yang berada di angka rata-rata 52% dan tergolong pada kategori yang rendah. Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat partisipasi politik dalam pemilihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurashid Solijonov¹³, peneliti berasumsi bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi memilih masyarakat Kota Padang dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Sumatera Barat.

Seiring dengan rendahnya partisipasi memilih masyarakat Kota Padang dalam pilkada, hasil survei *Transparency International* menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan skor indeks persepsi korupsi di Indonesia. Rentang tahun 2012 hingga tahun 2019 terlihat peningkatan indeks persepsi korupsi yang positif di Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2019

No	Tahun	Skor	Rank/Total Negara
1	2012	32	118/174
2	2013	32	114/175
3	2014	34	107/174
4	2015	35	88/166
5	2016	37	90/176
6	2017	37	96/180
7	2018	38	89/180
8	2019	40	85/180

Sumber: Diolah dari Tim Riset *Transparency International* Indonesia

¹³ Solijonov, Abdurahid. 2016. Voter Turnout Trends around The World. *Stockholm: International IDEA. Op. Cit*

Tabel 1.2 di atas menampilkan rentang waktu dan skor indeks persepsi korupsi Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2019 dengan hasil yang positif. Sementara skor indeks korupsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kota Padang berada di angka 63,1, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu di angka 50,0 pada tahun 2015.¹⁴ Berikut peningkatan skor indeks persepsi korupsi tersebut:

Tabel 1. 2
Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2015 dan Tahun 2017

No	Nama Daerah	Indeks Persepsi Korupsi	
		2015	2017
1	Kota Jakarta Utara	57,0	73,9
2	Kota Pontianak	58,0	66,5
3	Kota Pekanbaru	42,0	66,5
4	Kota Balikpapan	57,0	64,3
5	Kota Banjarmasin	68,0	63,7
6	Kota Padang	50,0	63,1
7	Kota Manado	55,0	62,8
8	Kota Surabaya	65,0	61,4
9	Kota Semarang	60,0	58,9
10	Kota Bandung	39,0	57,9
11	Kota Makassar	48,0	53,4
12	Kota Medan	57,0	37,4

Sumber: *Transparency International Indonesia*, 2017, Hlm. 12

Tabel 1.3 di atas menampilkan peningkatan skor indeks persepsi korupsi beberapa kota di Indonesia pada tahun 2015 ke tahun 2017. Berdasarkan tabel 1.3 di atas, 8 dari 12 kota yang disurvei mengalami peningkatan skor dimana Sumatera Barat termasuk daerah yang juga mengalami peningkatan. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Kota Padang yang membuat masyarakat malas untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan politik. Berikut rangkuman kasus korupsi yang terjadi di Kota Padang pada periode tahun 2015 hingga tahun 2020:

¹⁴ Suyatmiko, Wawan & Ratnaningtyas, Sekar. 2017. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 (Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia). *Transparency International Indonesia*. Hlm. 7

Tabel 1.4

Kasus-Kasus Korupsi di Kota Padang tahun 2015-2020

No	Kasus Korupsi	Tahun
1	Kasus Suap RAPBD 2016	2015
2	Kasus Dana Hibah KONI Kota Padang	2015
3	Kasus Korupsi Pengadaan Meubelair Kantor Walikota Padang	2016
4	Kasus Korupsi Pengadaan alat Berat Dinas PUPR Kota Padang	2017
5	Kasus Korupsi Dana BOS Madrasah Swasta Kota Padang	2018
6	Kasus Korupsi Pembangunan Embung Lubuk Minturun	2019
7	Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perkimtan Kota Padang	2020

Sumber: Diolah Peneliti

Terlihat pada tabel 1.4 diatas merajalela nya kasus korupsi inilah yang membuat indeks persepsi korupsi masyarakat kota Padang mengalami peningkatan dan juga mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik seperti ikut dalam pemilihan di TPS pada pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Kasus korupsi inilah yang akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam kontes pemilu atau pilkada di kota Padangt. Masyarakat akan memilih tindakan apatis dalam kontes politik karena pejabat beserta jajarannya banyak terlibat kasus korupsi. Menurunnya partisipasi politik masyarakat kota Padang dalam pemilu atau pilkada disebabkan kasus-kasus korupsi yang terjadi selama 5 tahun tersebut.

Korupsi pada umumnya mengacu pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Secara teoritis korupsi tidak hanya berdampak pada perekonomian dan kehidupan sosial. Korupsi juga berdampak negatif terhadap kehidupan politik seperti berkurangnya minat masyarakat terhadap partisipasi politik, kualitas demokrasi menjadi terganggu, dan sulit terwujudnya kesetaraan sosial. Apakah adanya hubungan antara persepsi

korupsi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang dalam pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat?

Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 juga menyatakan telah terjadi peningkatan indeks kepuasan hidup yang dimiliki masyarakat Sumatera Barat. Indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2014 berada di angka 66,79 persen, sedangkan pada tahun 2017 indeks kepuasan hidup tersebut telah meningkat ke angka 70,42 persen. Tabel berikut memperlihatkan peningkatan indeks kepuasan hidup tersebut:

Tabel 1.5
Indeks Kepuasan Hidup masyarakat Sumatera Barat tahun 2014 dan tahun 2017

Provinsi	Indeks Kepuasan Hidup
Sumatera Barat	66,79% 70,42%

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.5 di atas yang memperlihatkan peningkatan indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat dari tahun 2014 ke tahun 2017. Kepuasan hidup adalah konstruksi psikologis utama yang berfungsi sebagai kekuatan psikologis dalam diri seseorang terhadap kondisi kehidupan yang didasarkan pada standar pribadinya. Seseorang yang puas dengan kehidupannya cenderung untuk berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, dan umumnya lebih peduli dengan masalah sosial serta politik dibandingkan mereka yang kurang puas.¹⁵ Apakah adanya hubungan antara kepuasan hidup terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang?

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

¹⁵ Veenhoven, R. 1988. The Utility Of Happiness. *Social Indicators Research*, Vol. 20, (4). Hlm. 333–354. doi:10.1007/BF00302332.

1. Bagaimana hubungan antara persepsi korupsi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang
2. Bagaimana hubungan antara kepuasan hidup terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan hubungan antara persepsi korupsi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang.
2. Mendeskripsikan hubungan antara kepuasan hidup terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru tentang hubungan persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh banyak pihak untuk mengevaluasi dan memperbaiki tingkat partisipasi politik. Sehingga dapat menjadi pembanding tingkat partisipasi politik dari waktu ke waktu dalam pilkada yang dilaksanakan.